

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan akuntansi merupakan segala sesuatu yang digunakan secara licik untuk memperoleh keuntungan dengan cara menyembunyikan kebenaran, penipuan atau tipu muslihat dan cara-cara tidak jujur lainnya (Halim, 2015). Sedangkan kecenderungan kecurangan akuntansi merupakan perilaku ilegal dan tidak wajar yang dilakukan individu atau instansi untuk mendapat keuntungan berupa uang, kekayaan, atau jasa untuk keperluan individu ataupun organisasi (Amalia, 2015). Faktor yang menyebabkan kecurangan terjadi dibagi menjadi 2 yaitu kecurangan internal merupakan perbuatan ilegal yang dilakukan oleh pihak dalam yaitu meliputi seluruh anggota yang ada dalam instansi, sedangkan kecurangan eksternal merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak luar instansi yang melanggar peraturan dan dapat merugikan (Amin, 2013).

Kecurangan Akuntansi dapat terjadi akibat sejumlah keadaan yang menyebabkan hal itu benar-benar terjadi. Hal ini dikenal sebagai segitiga kecurangan (*fraud triangle*), yang terdiri dari tekanan, peluang, dan sikap. Tekanan yang dimaksud adalah niat seseorang pasti seseorang tersebut memiliki dorongan sendiri dalam melakukan kecurangan, kesempatan berarti terdapat situasi di dalam suatu instansi untuk melakukan kecurangan, dan sikap ketika tindakan tersebut telah diketahui biasanya pelaku akan memberikan alasan sebagai pembelaan diri (Amin, 2013)

Mengantisipasi adanya kecurangan akuntansi yang mungkin terjadi di dalam suatu instansi, maka diperlukan adanya pengendalian internal karena pengendalian memiliki peran untuk mencegah perilaku kecurangan, apabila pengendalian lemah maka dapat menciptakan peluang terjadinya kecurangan sebaliknya apabila pengendalian kuat maka kesempatan terjadinya kecurangan akan terminimalisir. Sistem pengendalian internal instansi/organisasi meliputi struktur organisasi, semua metode dan peraturan

terkoordinasi yang diterapkan di instansi/organisasi untuk melindungi aset, mengontrol keakuratan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi bisnis dan mendorong pemenuhan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh instansi/organisasi (Hartadi 1999). Bagi instansi pemerintah penting untuk menerapkan sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya kecurangan yang merugikan pihak berwenang, serta menerapkan sistem pengendalian internal yang baik yang diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan kepuasan kerja pegawai.

Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang penting untuk menentukan kinerja karyawan disuatu instansi ataupun organisasi. Semakin tinggi tingkat kepuasan kerja, maka potensi kecurangan (*fraud*) akan rendah. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat kepuasan kerja, maka potensi kecurangan (*fraud*) tinggi. Kepuasan kebutuhan organisasi memang biasanya membutuhkan uang, sebab uang dapat memenuhi kebutuhan hidup seseorang untuk membeli sandang, pangan, dan papan (Koehler, 1996). Kepuasan kerja juga mengacu pada masalah lingkungan kerja yang dihadapi karyawan sehubungan dengan tugas yang dibebankan pada pekerjaan, Semakin tinggi tingkat kepuasan kerja pegawai dengan fasilitas dan lingkungan kerja yang didapatkan maka akan meminimaisir kecurangan akuntansi. Hal ini sejalan dengan Aprishella (2014) yang menyatakan bahwa dalam penelitiannya pengendalian internal dan kepuasan kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun berbeda dengan Ahriati (2015) yang membuktikan bahwa sitem pengendalian internal tidak berpengaruh pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Dan populasi penelitian memilih 23 Dinas dan 7 Badan di Kabupaten Jember, karena Badan dan Dinas merupakan pihak yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam penggunaan dana instansi yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang ada pada 23 Dinas dan 7 Badan Kabupaten Jember.

Anggaran pada tahun 2020 terdapat temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Jember tahun 2020 sebesar Rp. 107.000.000.000., yang meliputi beberapa jenis belanja yaitu, belanja honorarium, belanja uang saku, belanja makan minum, belanja bantu sosial, belanja barang habis pakai, belanja modal. Badan Pemeriksa Keuangan menilai penyajian kas bendaharawan pengeluaran tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Berdasarkan pernyataan latar belakang diatas telah ditemukan perbedaan pada hasil penelitian terdahulu ditemukan bahwa variabel Pengendalian Internal tidak berpengaruh pada kecurangan akuntansi. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian di Dinas dan Badan yang ada di Kabupaten Jember. **“Pengaruh Pengendalian Internal dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi”** pada Dinas dan Badan Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
2. Apakah kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. Untuk menjelaskan pengaruh kepuasan kerja terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

1.4 Manfaat Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah dan menambah pengalaman, wawasan, serta pemahaman mengenai pengendalian internal dan kepuasan kerja terhadap kecenderungan akuntansi.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan serta sumbangan pemikiran untuk pertimbangan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan ketaatan akuntansi dan meminimalisir kecurangan.

3. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam memperoleh materi dan menyelesaikan skripsi yang sejenis bagi penulis di masa yang akan datang.